



JELANG PEMILU, RIUH 'KUTU LONCAT' PARTAI PUN BERULANG

Tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi'. Ungkapan populer di dunia perpolitikan tersebut benar adanya. Bak tradisi, tiap jelang Pemilu keriuhan politisi 'kutu loncat' terus berulang. Begitu juga di tahun ini menjelang pesta demokrasi akbar di 2024. Nama-nama populer menghebohkan publik karena berganti 'warna' bendera. Mantan Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli kini menjadi bakal caleg PDI Perjuangan. Kehebohan sempat terjadi saat dia menyatakan mundur dari PSI tepat setelah bakal calon presiden (Bacaleg) Prabowo Subianto datang ke kantor DPP partainya. Terbaru kegaduhan datang dari Hillary Brigitta Lasut. Dia terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Demokrat. Padahal Brigitta ditegaskan merupakan anggota DPR aktif dari NasDem. Sementara, yang saat ini menjadi buah bibir adalah Budiman Sudjatmiko. Politikus PDIP ini diberi dua pilihan: mundur atau dipecat. Bahkan dia disinyalkan merapat ke PSI usai diketahui hadir dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) 2023 PSI, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).



DEDI MULYADI
Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi sebelumnya ber-KTA Partai Golkar ini memutuskan pindah dan nyaleg di Gerindra. Dedi Mulyadi tercatat di data KPU sebagai bacaleg di dapil Jabar VII dengan nomor urut 1.



FERDINAND HUTAHAEAN
Ferdinand Hutahaean sebelumnya sebagai politisi dari partai Demokrat. Dia juga pernah diusulkan akan bergabung ke Gerindra namun saat ini tercatat dicalonkan PDIP di dapil DKI Jakarta III dengan nomor urut 5.



SURYA TJANDRA
Mantan politikus PSI, Surya Tjandra, saat ini maju di dapil DKI Jakarta III dengan nomor urut 2 lewat Partai NasDem. Di nomor urut 1, ada petahana sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI yaitu Ahmad Sahroni.



GUNTUR ROMLI
Mantan juru bicara PSI, M. Guntur Romli memutuskan keluar dari PSI karena dianggap keberadaan Prabowo di PSI mengganggu idealismenya. Dia tercatat terdaftar sebagai caleg dari PDIP untuk dapil Jatim III nomor urut 2.

(Baca Hal 11)

Lanjutan
di halaman
11...



EVA SUNDARI
Nama Eva Kusuma Sundari atau yang lebih dikenal Eva Sundari ini merupakan mantan anggota DPR periode 2004-2014 dari PDI Perjuangan. Namun, ia menyatakan hengkang dari partai ber lambang banteng itu ke partai NasDem. Di DCS KPU, Eva tercatat maju di dapil Jatim VIII dengan nomor urut 10.

**MEREKA YANG PINDAH PARTAI
JELANG PEMILU 2024**

**Government (Hal.2)
Teken Pembentukan
KPK, Megawati :
Kalau Tidak, Dibidang
Tak Antikorupsi**

Teken Pembentukan KPK, Megawati : Kalau Tidak, Dibilang Tak Antikorupsi



(Ilustrasi) Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur terkait penyelamatan KPK. (dok)

YOGYAKARTA-Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali bicara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di hadapan para relawan Ganjar Pranowo, di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023). Diceritakannya, detik-detik pembentukan Komisi KPK saat dia menjadi Presiden ke-5 RI.

Megawati mengaku sempat mempertanyakan mengapa KPK hanya badan ad hoc yang bisa dibubarkan. Saat itu, dia mendapat 'proposal' pembentukan KPK dari Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004, Bambang Kesowo.

"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa itu komisi? Komisi itu sifatnya ad hoc, Mas. Kenapa enggak ada lain lagi yang bisa lebih mantap? Karena ad hoc bisa dibubarkan dan itu TAP MPR untuk katanya membantu karena belum maksimal, Kepolisian, Kejaksaan harus dibuat lembaga dan dibuatnya komisi," kata Megawati.

Namun saat itu, Megawati mengaku diingatkan oleh Bambang soal urgensi pengesahan KPK. Meski dia pun membenarkan sebenarnya ingin KPK dibentuk lebih kuat dibandingkan hanya sebatas komisi saja.

"Beliau ingatkan saya, kalau enggak teken, Ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi. Wah betul juga. Yowes teken wae. Ini sifatnya hanya komisi menurut saya kurang kuat. Jadi harus diubah," ucap Megawati.

"Tapi kalo saya ngomong gini, ramai di media. Ibu Megawati karena kan dipotong, Ibu Megawati tidak setuju dengan adanya KPK bla, bla, bla... Tapi saya enggak peduli kok. Saya sama beliau ya di bawah beliau lah umur saya," ungkap dia.

Sebelumnya Megawati juga bicara soal eksistensi KPK. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan usulan membubarkan KPK. Dia menilai KPK saat ini sudah tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. "Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Pada tahun 2019, masyarakat akrab dengan kampanye atau narasi pelemahan KPK lewat revisi UU KPK. Dan salah satu partai yang sepakat saat itu adalah PDIP. Terkait pembubaran KPK, tak hanya kali ini saja disinggung Megawati. Pada 2015, dia juga menyampaikan hal serupa.

"Sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Tapi kalau kita berhenti korupsi, tidak korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran yang sangat logis," kata Mega di peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

"Kalau sekarang terus putar-putar

korupsi, sampai kapan yang namanya KPK? Padahal (namanya) Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut," ujar Megawati.

Mahfud Sebut Dorong Penguatan

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal usul Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, yang mengusulkan pembubaran KPK. Menurut Megawati, kinerja KPK kini tak efektif.

Mahfud mengatakan, pemerintah justru tengah mendorong penguatan KPK. Hal itu juga menjadi salah satu rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum dalam rapat siang ini.

"Tadi ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan," kata Mahfud di Kemenkopolkum, Selasa (22/8/2023).

Mahfud enggan menanggapi lebih lanjut. Ia hanya mengatakan jika memang ada usulan ini, maka akan dibahas pihak terkait. "Menurut saya tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, biar dibahas nantinya oleh ini (yang berkaitan). Saya tidak akan menanggapi itu," ujar Mahfud.

Terpisah, mantan penyidik KPK Novel Baswedan Novel Baswedan setuju dengan usulan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyarankan KPK dibubarkan. Namun, Novel menyebut hal itu menjadi pilihan kedua, di samping Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah besar untuk mem-

perbaiki KPK.

"Menurut saya, presiden mestinya melakukan langkah untuk memperbaiki KPK atau bila tidak mau lebih baik KPK dibubarkan saja," kata Novel kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Dia bilang, meski setuju KPK dibubarkan, namun upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan. "Tetapi kita harus mencermati bahwa tanggungjawab negara untuk memberantas korupsi harus tetap dilakukan walaupun dengan alat yang baru," ujarnya.

Menurutnya pernyataan Megawati yang mengusulkan KPK dibubarkan bentuk sindiran. "Karena KPK bekerja tidak efektif yang justru bermasalah," kata Novel.

Dia mengingatkan momen saat Megawati memperbaiki dasi Ketua KPK Firli Bahuri saat sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023 lalu. "Hal ini barangkali juga dilakukan oleh Ibu Megawati dengan memperbaiki posisi dasi Ketua KPK Firli Bahuri. Yang di mata publik itu mestinya diartikan sebagai ada yang salah dari pimpinan KPK dan perlu diperbaiki," tuturnya. (wid,rls,kum/dya)

BERKALI-KALI MEGAWATI SOROTI KPK

YOGYAKARTA, SELASA (22/8/2023)

"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa itu komisi? Komisi itu sifatnya ad hoc, Mas. Kenapa enggak ada lain lagi yang bisa lebih mantap? Karena ad hoc bisa dibubarkan dan itu TAP MPR untuk katanya membantu karena belum maksimal, Kepolisian, Kejaksaan harus dibuat lembaga dan dibuatnya komisi. Beliau ingatkan saya, kalau enggak teken, Ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi. Wah betul juga. Yowes teken wae. Ini sifatnya hanya komisi menurut saya kurang kuat. Jadi harus diubah."

JAKARTA SELATAN, SENIN (21/8/2023)

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng."

KOMPLEKS PARLEMEN, SENAYAN, JAKARTA, SELASA (18/8/2015)

"Sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Tapi kalau kita berhenti korupsi, tidak korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran



Wewenangnya Terbatas, Badan Siber dan Sandi Negara Keluhkan UU ITE

JAKARTA-Bila sebelumnya masyarakat umum mengeluhkan 'pasal karet' Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kini giliran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang melontarkan kritikan. Kepala BSSN, Hinsa Siburian meminta agar aturan tersebut direvisi lagi, karena keterbatasan wewenang lembaganya dalam melakukan tugas.

"Kewenangan penyidikan dari Kominfo ke BSSN belum dapat dilakukan karena terkendala dalam pasal 43 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik terkait PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," kata Hinsa dalam rapat bersama Komisi I, Selasa (22/8/2023).

Sebab, yang bisa disebut sebagai PPNS hanyalah pejabat pegawai negeri sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, dalam hal ini langsung merujuk pada Kominfo.

Dengan pembatasan ini, BSSN tidak dapat melakukan tindakan cepat tanggap untuk mengamankan data-data. Contohnya saat kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia beberapa waktu lalu. "Tidak adanya kewenangan BSSN dalam penyidikan dan penindakan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang menyebabkan tidak optimalnya penanganan dugaan kasus tersebut," jelasnya.

Untuk itu, BSSN meminta agar Komisi I melakukan revisi undang-undang dengan menambahkan pasal penguatan regulasi UU ITE dan pembentukan PPNS di BSSN sebagai optimalisasi peran negara dalam penindakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.



Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra (kiri) menjabat tangan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kanan) sebelum rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). (antara)

Secara detil, Hinsa Siburian memaparkan sebanyak 376 dugaan kebocoran data sektor infrastruktur informasi vital dalam rentang dari 2022 hingga Juni 2023. "Salah satu contoh kasus yang paling menyita perhatian publik yaitu kebocoran data. Berdasarkan data pada 2022 hingga akhir semester satu 2023, BSSN telah mendeteksi 376 dugaan kasus kebocoran data pada sektor infrastruktur informasi vital," kata Hinsa.

Hinsa merincikan, dari data tersebut terdapat 250 kasus pada 2022 dan 126 kasus pada 2023. Selain itu, dia mengatakan BSSN telah mendeteksi ratusan kasus melalui darkweb. "Di mana terdapat 250 kasus pada tahun 2022 dan 126 kasus pada tahun 2023. Dalam konteks ini yang ingin kami tekankan adalah bahwa BSSN mampu mendeteksi 127 kasus melalui darkweb sebelum menjadi viral di ranah publik," ujarnya.

BSSN, lanjut Hinsa, telah memberikan notifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik terkait dugaan kasus kebocoran data

ini. Namun dia menyebutkan sebagian besar notifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara sistem elektronik.

"Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan BSSN untuk tidak dapat memaksa penyelenggara sistem elektronik untuk menindaklanjuti notifikasi insiden siber. Tidak adanya kewenangan BSSN dalam penyidikan dan penindakan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang mengakibatkan tidak optimalnya penanganan dugaan kasus tersebut," tegasnya.

Dengan demikian, Hinsa menekankan perlunya penguatan kewenangan lembaganya untuk penyidikan dan penindakan tindak pidana di sektor informasi dan transaksi elektronik. Dia menyinggung, saat ini BSSN masih belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Pembentukan PPNS di BSSN sebagai optimalisasi peran negara dalam penindakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penindakan

tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik yang cepat, akurat, dan tuntas demi melindungi kepentingan nasional," ujar Hinsa.

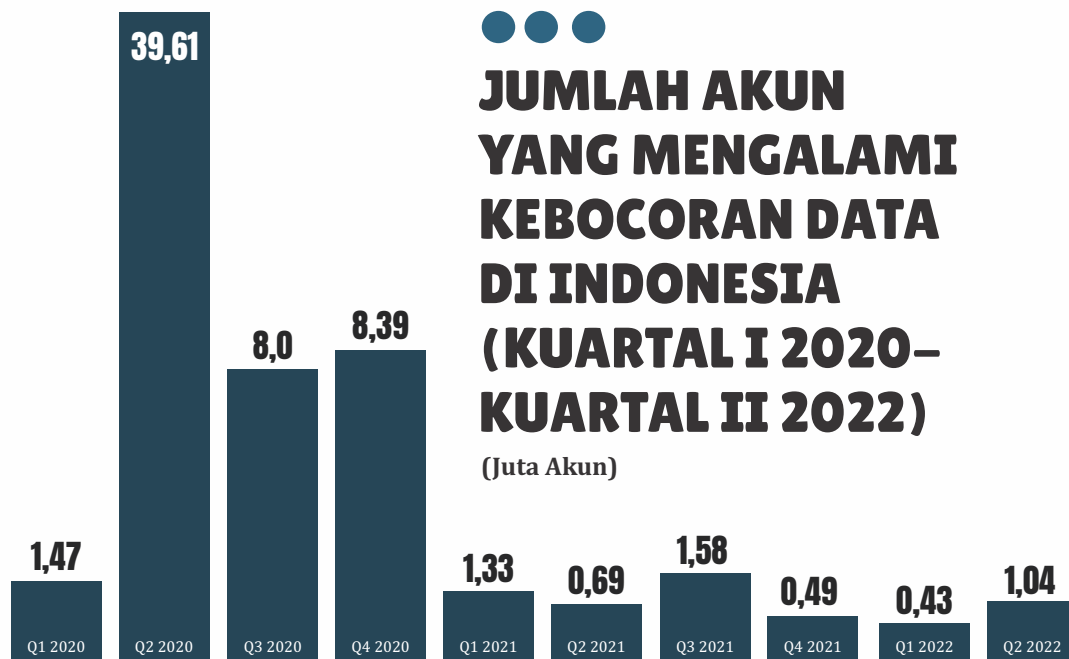
Usulan Dipertimbangkan DPR

Komisi I DPR mempertimbangkan BSSN untuk terlibat dalam tahap penyidikan tindak pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari usai rapat di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta mengatakan akan mempertimbangkan sekaligus membahas lebih lanjut pada pertemuan mendatang.

"Saya kira ini menjadi bahan bagi seluruh anggota Panja dalam rapat yang akan datang. Pembahasan ini sudah sampai di ujung banget masukan ini bisa memberikan kelengkapan bagi revisi yang kita lakukan," tutur Abdul Kharis. "Kepala BSSN menyampaikan beberapa hal teknis yang sering terjadi dalam penanganan insiden siber. Sesungguhnya kami akan lihat dahulu masukan tersebut pada agenda selanjutnya," lanjutnya.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan pun mendukung keputusan Abdul Kharis untuk membahas lebih lanjut penguatan peran BSSN dalam tahap penyidikan kasus terkait Teknologi ITE. Dirinya menegaskan bahwa butuh ada sinkronisasi peraturan agar implementasinya tidak menimbulkan polemik.

"Kita sangat ingin peran BSSN masuk ke dalam (perubahan) undang-undang ini, tetapi kita mesti pastikan melalui sinkronisasi dengan aturan yang lainnya. Ini penting supaya tidak bertentangan. Jadi konsekuensi legal juga enggak memberatkan," ucap Farhan. (wid,rls,ant/dya)



Pasca Vonis Bebas Dua Terdakwa, Pakar Hukum Desak Kasus tragedi Kanjuruhan Dibuka Lagi

SURABAYA - Pakar Hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Fachrizal Afandi menyarankan agar dilakukan penyidikan kasus Tragedi Kanjuruhan dibuka ulang. Hal ini buntut dari keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas dua terdakwa dari unsur kepolisian.

"Saya lebih menyarankan kalau penyidikan dibuka ulang. Karena penembak gas air matanya tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai sekarang," ujarnya dikutip dari Ngopibareng, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa fungsi dari penyidikan dibuka ulang ini agar pengusutan Tragedi Kanjuruhan dapat dilakukan secara komprehensif. Selama ini banyak pihak yang mengkritik proses hukum yang berjalan di kepolisian. Salah satunya rekonstruksi kejadian yang tidak sesuai dengan rekaman peristiwa di lapangan.

"Sehingga pelaku (tewasnya 135 korban Tragedi Kanjuruhan) sesungguhnya bisa ditemukan. Bukan angin," katanya.

Fachrizal Afandi juga mengkritik majelis hakim yang memberikan vonis bebas pada kedua terdakwa yaitu mantan Kabag Ops Polres Malang Kumpul Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

Mereka berdua divonis bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa gas air mata yang ditembakkan tertiuip oleh angin menuju ke tribun penonton. "Majelis Hakim tidak menggali dengan benar. Kebenaran materiil," ujarnya.

Fachrizal mengatakan bahwa proses persidangan Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya tidak dilakukan secara komprehensif. Sehingga putusan yang dihasilkan mendapatkan kritikan dari masyarakat terutama keluarga korban dan penyintas.

"Hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta Police Hazard (PH) yang dari polisi aktif," katanya.

Sementara itu, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Devi Athok Yuliandri mengusulkan beberapa pasal baru untuk menjerat tersangka utama dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Hal itu disampaikan Devi Athok bersama keluarga korban tragedi Kanjuruhan ketika bertemu dengan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Selasa (22/8/2023) malam.

Dengan adanya pasal baru yang diusulkan pada pertemuan yang dihadiri Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) dan juga LBH Pos Malang selaku penasehat hukum



Tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, terlihat polisi di tengah asap gas air mata.

keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini, maka membuka peluang untuk dilakukan penyidikan ulang atau dibukannya kembali penyidikan kasus tersebut.

"Alhamdulillah baik semua. Kami diterima baik oleh pak kapolres. Bahkan ada Pasal perubahan yang diusulkan pak Devi Athok yang juga bisa diterima baik oleh pak Kapolres. Bahkan pak kapolres akan melakukan gelar bersama. Kami sebagai pihak dari TATAK, mengapresiasi itu bahwa ada kemajuan lah, penyelidikan yang dilakukan," tegas Muhammad Tarmizi, Kuasa Hukum Tim TATAK atau yang disampa Habib, malam selepas pertemuan di Ruang Rupatama Polres Malang.

Habib mengaku, pasal baru tersebut adalah pasal 340 dan 338 perihal pembunuhan berencana yang akan diajukan ke Laporan Model B di Polres Malang dari pelapor Devi Athok dan kawan-kawan, masih bisa dilakukan.

"Intinya belum gagal. Masih mau mengadakan gelar lagi. Jadi nggak ada gagal. Inshaallah bisa dibuktikan. Kalau 340 nggak bisa, 338nya. Atau ada pasal lain yang diusulkan oleh Devi Athok sendiri tadi. Dan itu murni dari pemikiran beliau, bukan dari kita," tegas Habib.

Sementara itu, Devi Athok mengaku, pihaknya juga mempunyai saksi yang mengetahui kedua putri kandungannya, meninggal dalam tragedi kanjuruhan. "Ada saksi yang melihat putri saya, Sasa dan Lala meninggal dunia. Saya juga masih menyimpan bukti selongsong peluru. Itu nanti akan kami sampaikan melalui LBH dan Pak Habib sebagai pengacara TATAK," ujarnya.

Mendengar bukti selongsong peluru, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menyambut baik apa yang kini disimpan Devi Athok. Kholis juga mempertanyakan apakah

selongsong itu sempat dibawa ketika menjalani sidang di Surabaya.

"Saya tidak diberi kesempatan menunjukkan barang bukti yang saya simpan Pak. Saat sidang di Surabaya saya seperti diserang. Saya sendirian. Karena dalam sidang itu terdakwa tidak mengaku ada penembakan gas air mata," kata Devi Athok menjawab pertanyaan Kapolres Malang.

Kholis kemudian meminta Devi Athok untuk menyimpan barang bukti itu dengan baik. Sehingga, nantinya bisa ditunjukkan saat proses penyelidikan ataupun penyidikan setelah gelar perkara bersama dilakukan.

"Tadi masukan masukan, saran saran, bagus untuk kami pertimbangkan dan tentunya akan kita tindak lanjuti dengan secepat cepatnya, tergantung ketersediaan keluarga korban Kanjuruhan dan penasehat hukumnya," tegas Kholis.

Kholis mengaku, pertemuan dengan keluarga korban tragedi kanjuruhan cukup konstruktif. "Rekan rekan media bisa melihat sendiri pertanyaan pertanyaan dari keluarga korban yang kita jawab dan kita luruskan. Dan kami akan terus memberikan porsi dan waktu terbesar kami untuk keluarga korban Kanjuruhan. Kami tidak melihat dari kelompok mana, tapi semua akan kami akomodir," ujar Kholis.

Dalam pertemuan selama dua jam lebih itu, sambung Kholis, keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang selama ini getol memperjuangkan keadilan, hanya ingin ada transparansi dalam proses penegakan hukum.

"Keluarga korban ingin transparan, untuk membahas beberapa alternatif dan mencari solusi yang bisa kami tindak lanjuti, dan juga nanti beberapa hal yang lebih teknis akan dibahas dalam forum gelar perkara bersama para penyidik yang

selama ini mengerjakan berkas Tragedi Kanjuruhan. Ini sebagai bentuk wujud transparansi kami juga," beber Kholis.

Di tempat sama, Penasehat Hukum Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan dari LBH Pos Malang, Darmawan Pandean, menerangkan dalam pertemuan hari ini intinya tetap mendesak dan mengawal laporan model B

"Ya inilah teman teman yang masih memperjuangkan keadilan tragedi kanjuruhan, dan masih tetap bersuara tentang tragedi kanjuruhan. Tadi memang ada beberapa masukan dan ada yang dibahas, soal rekonstruksi stadion kanjuruhan, ya mungkin nanti bisa diupayakan dilakukan rekonstruksi kembali untuk laporan model B ini," tuturnya.

Darmawan menambahkan, soal laporan yang sudah dilaporkan, yaitu Pasal 338 dan 340, terkait pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana akan kembali diupayakan.

"Nanti bisa diupayakan juga gelar perkara khusus, nah ini gelar perkara khusus ini bisa memunculkan pasal pasal yang baru. Yang memang lebih spesifik terhadap perempuan dan anak. Karena tragedi kanjuruhan ini juga melibatkan perempuan dan anak. Ada 44 anak dan 31 perempuan yang meninggal dunia pada tragedi ini," tegasnya.

Masih kata Darmawan, dalam proses hukum yang dilakukan di Surabaya, belum ada atau sama sekali tidak menyentuh soal perempuan dan anak.

"Tadi kita bicara soal itu, semoga nanti bisa digelar perkara khusus, jadi bukan hanya 340 dan 338, tapi juga soal perempuan dan anak dimasukkan dalam pasalnya," Darmawan mengakhiri. (lut/dya)

“

Saya lebih menyarankan kalau penyidikan dibuka ulang. Karena penembak gas air matanya tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai sekarang. Sehingga pelaku (tewasnya 135 korban Tragedi Kanjuruhan) sesungguhnya bisa ditemukan. Bukan angin,"

FACHRIZAL AFANDI

Pakar Hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur

Lagi Website DPRD Bojonegoro Diretas



ilustrasi peretasan website

SURABAYA - Website DPRD Bojonegoro kembali dibobol atau diretas. Peretas terakhir menyerang tampilan muka situs (deface) dengan menampilkan tulisan 'Aplikasi apa tong yang kamu buka? Gak jelas...'. Website ini dinonaktifkan.

Sebelumnya, website dengan alamat situs dprd.bojonegorokab.go.id itu diretas pada Minggu (20/08/2023) dan sempat terjadi juga pada Jumat (26/05/2023). Website DPRD itu kini dinonaktifkan sementara karena Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro bersama pihak pengembang masih melakukan sejumlah pembenahan.

Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Bojonegoro Sutrisno mengatakan, pihak pengembang saat ini masih melakukan pembenahan. Sehingga untuk sementara waktu menonaktifkan website DPRD hingga selesai dibenahi.

"Sudah dilakukan pen test [penetration testing]. Pihak pengembang website DPRD Bojonegoro membenahi dulu webnya. Untuk sementara [website] down dulu sampai selesai dibenahi," ujarnya, dikutip dari Selasa (22/08/2022).

Sutrisno menjelaskan bahwa untuk Data Center Pemkab Bojonegoro memiliki tiga server DNS (domain name system), yaitu dua server Bare Metal di Data Center Pemkab Bojonegoro dan satu server VM (Virtual Machine) di Data Center Telkom Sigma.

Terkait kasus peretasan tersebut, Sutrisno mengungkapkan bahwa untuk aplikasi website DPRD Bojonegoro, pihak Sekwan (Sekretariat DPRD Bojonegoro) melakukan pengadaan sendiri, dan pengelolaan website tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak Sekwan.

Sementara untuk hosting,

menggunakan VM Server (Virtual Machine Server) yang disediakan oleh Kominfo. Termasuk create (pembuatan) sub domain (dprd.bojonegorokab.go.id), juga dilakukan oleh Kominfo. "Hanya hosting dan domain. Pengelolaan (website) ada si Sekwan," kata Sutrisno.

Sutrisno juga menjelaskan bahwa dalam kasus peretasan tersebut, banyak kemungkinan celah yang dapat dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh peretas. Bisa melalui kelemahan server, bisa melalui kelemahan aplikasi web, bisa melalui kelemahan jaringan, dan sebagainya.

Sementara untuk keamanan (security) jaringan Data Center Pemkab Bojonegoro dilindungi Appliance Firewall, dan sejauh ini, server-server yang dikelola Kominfo Bojonegoro masih relatif aman dari peretasan. Server-server tersebut ditempatkan di zona aman dan secara periodik dilakukan update (patch security), baik dari sisi sistem operasi dan aplikasi pendukung.

"Sudah dipastikan oleh tim internal (Kominfo) tidak ada masalah dengan DNS server tersebut. Peretasan yang terjadi kali ini tidak ada hubungannya dengan DNS Server. Analisa awal tim internal, peretasan terjadi pada kelemahan scripting aplikasi web dan ini bukan pertama kalinya terjadi," ungkapnya.

Sementara salah satu web developer asal Bojonegoro Alifiansyah Mustafa mengatakan, untuk mengatasi peretasan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui sumber masalah peretasan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penetration testing.

"Webapp (website aplikasi) harus dilakukan penetration testing agar diketahui celah-celahnya yang bocor di mana. Kalau sudah ada hasil auditnya, dibenahi webapp-nya

berdasarkan hasil audit tersebut. Ini penanganan jangka pendek, tapi kalau masih kejadian lagi, ya artinya celahnya bukan hanya di situ. Bisa jadi si peretas sudah menemukan celah lain," kata pria yang akrab disapa Ian.

Ian juga mengingatkan bahwa jika penanganan peretasan website tersebut tidak tuntas, maka masih ada kemungkinan website tersebut akan kembali diretas. "Kalau kemarin yang diserang tampilan muka situsnya (deface) diubah, artinya peretasnya bisa masuk sistem, dan peretas seperti ini masih meninggalkan backdoor di dalam server," pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan sebanyak 50 persen website yang diretas menggunakan domain go.id atau yang selama ini digunakan untuk instansi pemerintah. Sedangkan 50 persen lainnya adalah website dengan domain umum, seperti .com, .net, .ac.id, .or.id, atau .org.

Dinas kominfo Jatim, mengungkap ada beberapa alasan mengapa website pemerintah lebih banyak diserang. Salah satunya adalah karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan seseorang terhadap pelayanan atau data yang ditampilkan di website milik pemerintah.

Itu memicu serangan terhadap website, sehingga situs milik pemerintah itu datanya dirusak dan jaringannya jadi terkunci. Namun, secara umum serangan hacker (perusak data situs web) berharap agar kinerja pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Dengan adanya banyak situs web pemerintah yang diserang, lanjut dia, maka perlu adanya pelatihan dan pembekalan bagi operator website pemerintah. Mereka harus diajari bertahan dari serangan hacker, tapi bukan menjadi penyerangnya.

Adapun beberapa contoh website pemerintah di Jatim kondisi diretas,

yakni www.disnak-jatim.go.id, www.dinsosjatim.go.id, www.banyuwangikab.go.id, www.blitar.imigrasi.go.id, www.kpid-jatimprov.go.id, www.dpkad.probolinggakab.go.id, www.pn-malang.go.id dan www.pkk.banyuwangikab.go.id.

Selain melalui website, kerusakan data juga sering ada dari akses jaringan internet WiFi. Dari hasil monitoring data Kementerian Kominfo pada Februari 2012 lalu, di Surabaya dari sekitar 600 jaringan WiFi, 400 jaringan di antaranya tidak dikunci (tak gunakan user id dan password). Sehingga, dengan potensi jaringan WiFi unsecure (tak terkunci) itu, maka potensi perusakan dan penyerangan data dapat juga dilakukan oleh hacker.

Menyikapi hal tersebut, di era global saat ini keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan. Ini karena jaringan komputer dan internet yang mudah diserang itu sifatnya global dan tidak aman. Saat data terkirim dari satu komputer ke komputer lain akan memberi kesempatan pada user internet lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.

Untuk itulah, perlu adanya keamanan sistem informasi data global yang sifatnya komprehensif. Sebab tidak ada satupun sistem komputer yang bisa diamankan 100 persen. Akan tetapi yang dilakukan adalah hanya bisa mencegah dan mempersulit pihak lain yang hendak mengganggu sistem yang ada. (lut/dya)



Sudah dilakukan pen test [penetration testing]. Pihak pengembang website DPRD Bojonegoro membenahi dulu webnya. Untuk sementara [website] down dulu sampai selesai dibenahi,"

SUTRISNO

Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Bojonegoro



AZIZAH SALSHA

Pamer Buku Nikah

Foto-Foto : Berbagai Sumber

SELEBGRAM dan TikToker Azizah Salsha resmi dinikahi pemain Timnas sepak bola Indonesia Pratama Arhan.

Seusai akad nikah, Azizah dan Arhan pun memamerkan buku pernikahnya.

Azizah dan Arhan memamerkan buku nikah usai akad nikah yang digelar di Masjid Indonesia Tokyo, Minggu (20/8/2023) pukul 13.00 JST, atau 11.00 WIB.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR Dasco hadir sebagai saksi dalam akad nikah putri politikus Gerindra Andre Rosiade itu.

Dalam prosesi pernikahan tersebut, Juru Bicara pihak keluarga pria diwakili oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, sedangkan Juru bicara pihak keluarga wanita adalah Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan sederhana. Hanya keluarga dan kerabat dekat yang diundang.

Profil

Nurul Azizah Rosiade atau yang kerap disapa Azizah Salsha (Zize) merupakan selebgram yang memiliki beribu-ribu followers di akunnya.

Ia kerap kali mengunggah berbagai macam konten yang tengah ramai, mulai dari kesehariannya, pakaian yang sedang ia kenakan, hingga berbagai hal lainnya selayaknya artis TikTok.

Latar Belakang

Azizah Salsha merupakan seorang anak dari anggota DPR RI yang

bernama Andre Rosiade. Andre sendiri merupakan anggota Komisi VI DPR RI dengan masa jabatan 2019 - 2024.

Dalam laman Instagram resmi miliknya, Andre juga seringkali membagikan berbagai momen bersama dengan putrinya itu.

Maka, tak heran jika nama-nama seperti Erick Thohir dan Sufmi Dasco Ahmad pergi menuju Tokyo, Jepang, untuk menghadiri pernikahan mereka berdua, mengingat ayahanda dari Azizah juga menjadi rekan kerja dari kedua politisi itu.

Karier

Azizah Salsha sendiri memiliki beribu-ribu pengikut dalam laman Tiktok dan Instagram resmi miliknya.

Diketahui, sebanyak 548.000 lebih akun mengikuti seleb ini di Instagram dan lebih dari 614.000 akun yang mengikutinya di Tiktok.

Ia memiliki hobi dalam bermain golf, ia juga kerap kali membagikan kesehariannya dalam olahraga tersebut kepada para pengikutnya. Selain itu, wanita yang biasa dipanggil Zize ini juga sering membagikan konten bersama dengan teman-temannya.

Beberapa nama dari teman yang ia miliki juga terdapat di sesama kalangan artis seperti Devano Danendra, Yoriko Angeline, hingga Jennifer Coppen (berbagaisumber)

- •
- •
- •

PROFIL

Nama Lengkap:
Nurul Azizah Rosiade

Nama Panggung:
Azizah Salsha

Nama Panggilan:
Zize

Agama:
Islam

Tanggal lahir:
21 Oktober 2003

Kota Asal:
Jakarta

Nama Orang tua:
Andre Rosiade (papa),
Nurul Anastasia (mama)

Profesi:
Seleb Tiktok, selebgram

Akun Instagram:
@azizahsalsha_

Akun Tiktok:
@azizahsalshaa



MANFAAT MAKANAN MAKANAN PEDAS BAGI KESEHATAN

MAKANAN pedas telah menjadi bagian dari berbagai kuliner di seluruh dunia. Di Indonesia, banyak makanan yang disajikan secara pedas bahkan sambal merupakan bahan makanan unggulan di Indonesia.

Cabai memiliki rasa tajam dan menantang sering kali menjadi pilihan favorit bagi orang yang suka mengeksplor rasa. Namun, makanan pedas bukan hanya tentang sensasi panas di lidah.

Ada manfaat kesehatan yang terkait dengan konsumsi makanan pedas dan beberapa hal yang perlu diketahui sebelum Anda menikmatinya secara berlebihan.

Dilansir dari USA Today, Sabtu (19/8/2023) makanan yang berbumbu, seperti pedas, umumnya baik untuk tubuh. Contohnya adalah paprika yang rendah kalori dan kaya akan vitamin dan antioksidan.

Senyawa yang memberi bumbu pada paprika, capsaicin, telah ditemukan memiliki banyak manfaat kesehatan.

Emily Feivor, ahli diet terdaftar di Long Island Jewish Forest Hills di Queens, New York, mengatakan bahwa capsaicin telah ditemukan untuk membantu mengurangi tekanan darah tinggi serta meningkatkan kolesterol baik (HDL) dan mengurangi kolesterol jahat (LDL).

Karena sifat antioksidan capsaicin, itu dapat melindungi dari penyakit tertentu dan meningkatkan kesehatan usus.

Namun, makanan

pedas bisa menjadi tidak sehat tergantung cara menyiapkannya. Misalnya, makanan pedas yang disiapkan dengan banyak krim keju yang dapat meningkatkan kalori dan lemak. Atau makanan yang sangat pedas sehingga membuat perut Anda kesakitan.

Berikut adalah beberapa manfaat dari makanan pedas:

1. Menurunkan berat badan

Menurut juru bicara nasional Akademi Nutrisi dan Dietetika Grace Derocha, sedikit penelitian menunjukkan bahwa capsaicin bekerja pada bagian otak (hipotalamus) yang mengontrol rasa lapar dan isyarat kenyang untuk membuat seseorang makan lebih sedikit dan merasa lebih cepat kenyang.

Namun, ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa makan makanan pedas tidak berdampak signifikan terhadap berat badan.

2. Membantu sistem kekebalan tubuh

Makanan pedas mengandung antioksidan, yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh. Dalam hal sistem kekebalan tubuh, makanan pedas mengandung antioksidan dan sifat antimikroba bersama dengan vitamin, mineral, dan serat yang dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh.

Walaupun demikian, penting

untuk dicatat bahwa beberapa orang mungkin merasa sakit perut setelah makan makanan pedas. Jika sensitif atau menderita maag, Anda mungkin harus menghindari makanan panas. Makanan pedas juga tidak menyebabkan bisul, tetapi dapat memperparahnya.

3. Mengurangi tekanan darah

Dalam sebuah studi pada orang dewasa Cina, wanita yang melaporkan bahwa mereka "biasanya" makan makanan pedas memiliki kemungkinan 26 persen lebih rendah untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak makan pedas.

4. Kesehatan jantung yang lebih baik

Makanan pedas mungkin membuat Anda berkeringat, tetapi juga baik untuk jantung Anda. Sebuah studi menemukan korelasi antara kesehatan jantung dan makanan pedas. Ini mungkin sebagian karena jumlah kolesterol yang lebih baik.

5. Risiko kematian yang lebih rendah

Menurut meta-analisis pada 2021 dalam jurnal *Angiology*, asupan makanan pedas yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat kematian yang lebih rendah.

Dibandingkan dengan orang yang tidak makan makanan pedas, mereka yang memakannya lebih dari sekali seminggu memiliki risiko kematian 12 persen lebih rendah dari penyebab apa pun selama masa tindak lanjut 10 tahun (bisnis)



10 TIPS MENGHINDARI MALWARE DI PONSEL

DALAM era digital saat ini, ponsel tidak lagi hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi telah bertransformasi menjadi alat multifungsi yang mendukung berbagai aktivitas kita sehari-hari.

Namun, dengan meningkatnya fungsi ponsel, ancaman malware juga semakin meningkat. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu melindungi ponsel kamu dari malware.

1. Unduh Aplikasi dari Sumber Terpercaya

Selalu unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi seperti Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Hindari mengunduh aplikasi dari sumber ketiga yang tidak dikenal.

2. Perhatikan Izin Aplikasi

Sebelum menginstal aplikasi, periksa izin apa yang diperlukan oleh aplikasi tersebut. Jika sebuah aplikasi mengharuskan kamu memberikan izin yang tidak relevan dengan fungsinya, pertimbangkan untuk tidak mengunduhnya.

3. Perbarui Sistem Operasi

Pembaruan sistem operasi biasanya mencakup patch keamanan untuk melindungi ponsel dari ancaman malware terbaru. Pastikan ponsel kamu selalu diperbarui.

4. Gunakan Antivirus

Meskipun banyak ponsel canggih sudah dilengkapi dengan fitur keamanan, memiliki aplikasi antivirus tambahan dapat memberikan lapisan perlindungan ekstra.

5. Hindari Mengklik Tautan Mencurigakan

Baik itu di pesan teks, email, atau media sosial, hindari mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau tampak mencurigakan.

6. Jaga Keamanan Jaringan

Gunakan koneksi Wi-Fi yang aman dan hindari menggunakan Wi-Fi publik tanpa proteksi. Jika harus menggunakan Wi-Fi publik, pertimbangkan untuk menggunakan VPN.

7. Hindari 'Rooting' atau 'Jailbreaking'

Melakukan rooting (untuk Android) atau jailbreaking (untuk iOS) memang membuka akses ke fitur-fitur tambahan. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko malware.

8. Buat Cadangan Data

Pastikan kamu secara rutin membuat cadangan data ponsel kamu. Hal ini akan memudahkan pemulihan data jika ponsel terinfeksi malware.

9. Tetap Terinformasi

Pahami jenis-jenis malware dan ancaman keamanan terbaru. Dengan memahami ancaman yang ada, kamu akan lebih siap untuk melindungi diri.

10. Hati-hati dengan Akses Fisik

Jangan biarkan orang asing mengakses ponsel kamu, dan gunakan kunci layar untuk menambah lapisan keamanan.

Dengan mengikuti tips di atas, kamu dapat mengurangi risiko ponsel kamu terinfeksi malware dan menjaga informasi pribadi kamu tetap aman (Viva)



Sumber Foto :
Doc.TWC/for media



PRAMBANAN "CATWALK NUSANTARA" ANGKAT POTENSI INDONESIA

"PRAMBANAN Catwalk Nusantara" yang diselenggarakan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko di Kawasan Candi Prambanan pada peringatan HUT ke 78 Republik Indonesia 17 Agustus 2023 dimaksudkan untuk mengangkat potensi kain asli Indonesia.

"Kegiatan ini menghadirkan wastra nusantara seperti batik, lurik, tenun, songket dan ekoprint sebagai sarana mendukung pemajuan kain wastra nusantara sekaligus wujud cinta dan bangga terhadap seni budaya Indonesia," kata Direktur Pemasaran, Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT TWC Hetty Herawati di Sleman.

Menurut dia, kegiatan yang digelar

di area "concourse" destinasi Taman Wisata Candi Prambanan ini terwujud berkat kerja sama dan kolaborasi antara PT TWC dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Aksi ini dihadirkan untuk mewarnai Semarak Merah Putih di destinasi Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan," katanya.

Ia mengatakan, Semarak Merah Putih melalui aksi Prambanan Catwalk Nusantara ini melibatkan 13 perancang busana dari DIY, yang menghadirkan karya-karya terbaiknya, interpretasi atas busana dari pulau-pulau yang ada di

nusantara.

"Karya tersebut dibawakan oleh sejumlah peragawati dengan berjalan menyusuri 'catwalk' berlatar Candi Prambanan," katanya.

Hetty mengatakan, acara ini juga dimeriahkan oleh perlombaan peragaan busana daerah oleh para pengunjung di Candi Prambanan.

"Kemegahan candi Hindu terbesar di Indonesia, berpadu dengan seni busana menjadi satu kombinasi pertunjukan yang elegan," katanya.

Ia mengatakan, "Prambanan Catwalk Nusantara" ini menjadi langkah awal kolaborasi dengan para perancang busana untuk melakukan pagelaran karya di destinasi Taman Wisata Candi.

"Selain itu, 'Prambanan Catwalk Nusantara' juga diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan kepada wastra nusantara. Kegiatan ini merupakan upaya mengkolaborasikan antara destinasi cagar budaya dengan kekayaan wastra nusantara untuk kita sandingkan dalam satu pagelaran, yang walaupun sederhana namun tetap bermakna," katanya.

Terlebih, kata dia, kegiatan ini dilakukan di Hari Kemerdekaan RI, yang bisa menjadi satu "experience" untuk mengukuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Yogyakarta Sugeng Waskito mengatakan, pihaknya mendukung

penuh adanya kolaborasi ini.

"Pagelaran 'Prambanan Catwalk Nusantara' ini menjadi panggung yang istimewa, dengan latar kemegahan Candi Prambanan. Kami bersama para anggota APPMI tentunya senang bisa ikut serta memeriahkan peringatan Kemerdekaan RI ini. Semoga ke depan hal ini bisa terus dilanjutkan, dengan menggunakan destinasi-destinasi lainnya," katanya (Ant)

Sumber Foto :
Doc.TWC/for media



Jelang Pemilu, (dari hal 1)

BERBAGAI partai diguncang kepindahan para politisi 'kakapnya' jelang Pemilu 2024. Adu pernyataan pun terjadi terkait alasan hingga parpol asal yang mengaku tak dimintai izin. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali miaalnya, mengaku kaget perihal nama Hillary Brigitta Lasut yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Demokrat untuk Pemilu 2024. Padahal menurutnya Brigitta merupakan anggota DPR aktif dari NasDem.

Hillary saat ini tercatat sebagai anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem. Ia merupakan anggota DPR termuda pada periode 2019-2024. "Saya kaget juga mendengar itu, karena setahu saya Hillary ini anggota DPR RI dari Partai NasDem yang masih aktif hari ini," kata Ali.

Ali pun mempertanyakan apakah Hillary memiliki KTA partai lebih dari satu. Ia selanjutnya juga mempertanyakan alasan Hillary yang langsung maju lewat Demokrat tanpa permissi dari NasDem.

Berdasarkan DCS DPR RI yang dirilis KPU, Hillary maju caleg Demokrat untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara. Dalam DCS tersebut, Hillary Brigitta Lasut mendapatkan nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Utara.

Ali pun meminta agar KPU menggugurkan status pendaftaran caleg Brigitta lewat Demokrat itu. "Di sini kita bicara tentang integritas, you mau berada pindah ke partai lain dengan pertimbangan itu hak kamu. Tapi di sisi lain kamu harus menanggalkan fasilitas yang kamu miliki dari partai sebelumnya," ujar Ali.

Saat dikonfirmasi, Brigitta mengaku dirinya sudah bukan menjadi kader NasDem setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mengeluarkan surat pergantian antarwaktu (PAW) per 27 Juni lalu.

Dalam dokumen surat yang diberikan kepada CNNIndonesia.com, terlihat surat bernomor F-Nasdem. 210/DPR RI/VI/2023 itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem Roberth Row dan Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa.

Dalam surat itu tertulis penyampaian pencabutan penempatan tugas alat kelengkapan dewan di DPR RI atas nama Hillary Brigitta Lasut. "Pura-pura kaget seperti itu biasa di politik. Malah saya sudah membuat gugatan ke mahkamah partai tapi belum ditanggapi," kata Hillary.

Hillary mengatakan sebelum surat itu dilayangkan, dirinya sudah mendapatkan informasi bahwa proses PAW atas dirinya sudah dilakukan sejak Mei-Juni 2023. Namun, menurutnya upaya PAW itu tidak diproses oleh Ketua DPR lantaran dirinya tidak berkhiran terhadap NasDem. "Ini hanya dinamika internal karena satu dapil dengan senior-senior di partai," kata dia.

Hillary dapat melenggang ke DPR setelah mengantongi 70.345 suara di daerah pemilihan Sulawesi Utara pada Pemilu 2019. Perempuan kelahiran Manado, 22 Mei 1996 itu mendapat

sorotan saat menjadi pimpinan sementara sidang paripurna awal masa jabatan anggota MPR, DPR, DPD periode 2019-2024. Saat itu, ia selaku anggota dewan termuda memimpin sidang bersama anggota DPR tertua, almarhum Abdul Wahab Dalimunthe.

Dia pun dibela oleh partainya saat ini. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai permintaan menggugurkan nama Hillary harus diabaikan. "KPU harus mengabaikan dan menolak permintaan Ahmad Ali cq NasDem ini ya," kata Jansen kepada wartawan.

Sebelumnya kehebohan serupa terjadi saat mantan Kader PSI Guntur Romli kini menjadi bakal caleg PDI Perjuangan. Dia nyaleg di Jawa Timur III. Padahal, Guntur Romli baru saja mundur dari PSI pada 5 Agustus 2023 lalu. Namanya masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) di Dapil Jatim III meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso yang telah ditetapkan KPU. Di dapil yang sama pada pileg 2019 silam, dia gagal lolos di Senayan melalui PSI.

Ketua DPP PSI Sigit Widodo meminta agar Guntur Romli tak lagi mencari-cari alasan untuk pindah partai. "Saya mendoakan Mas Guntur bisa menjadi petugas partai yang baik di PDIP. Namun saya harap Mas Guntur tidak lagi mencari-cari alasan untuk kepindahannya," kata Sigit.

Sebelumnya, Guntur Romli mengakui dirinya saat ini terdaftar sebagai bacaleg di Partai usungan Megawati Soekarnoputri itu. Dia mengatakan bahwa dirinya sempat tak ingin masuk partai setelah keluar dari PSI. Namun setelah melihat Golkar dan PAN dukung Prabowo ia lalu memutuskan gabung di PDIP.

"Semula saya tidak mau masuk Partai lagi, namun begitu melihat Ganjar dikeroyok oleh parpol-parpol dan di situ ada kekuatan Cendana bahkan 'owner' Cendana akan 'come back', maka saya akhirnya memilih ke PDI Perjuangan. Saya tidak mau Republik ini jatuh ke rejim Cendana dan kroni-kroninya," kata Guntur Romli.

Pengamat Ungkap Pemicunya

Berdasarkan catatan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada Pemilu 2019 terdapat 31 anggota DPR yang memutuskan pindah parpol. 20 dari 31 orang tersebut pindah ke Partai Nasdem. Sementara 11 lainnya tersebar ke enam parpol, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, dan Partai Berkarya.

Analisis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam tidak memungkiri bahwa faktor pragmatisme juga menjadi alasan kemunculan politik "kutu loncat." Ia beralasan, kader kutu loncat muncul karena melihat probabilitas untuk menang. "Motifnya adalah motif dasarnya adalah soal pragmatisme politik bagaimana parpol dilihat sekadar sebagai kendaraan kekuasaan," kata Imam.

Sementara di sisi lain, publik akan menilai kandidat sebagai kutu loncat dan tidak punya pendirian. Namun, publik bisa saja permisif selama kepentingan pendukung diakomodir

oleh kandidat kutu loncat tersebut. "Bagi rakyat tentu ada plus minusnya. Jika dia bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, apa pun partainya tentu tidak begitu masalah, tetapi kalau kemudian sekadar mendapat kekuasaan, tentu menjadi masalah," kata Imam.

Analisis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengakui, fenomena kutu loncat partai masih ada. Ia sebut penyebabnya banyak faktor. Pertama adalah ketidaksesuaian antara pandangan kader dengan platform partai. Hal itu tidak dipungkiri kerap terjadi jelang pergantian kekuasaan.

Faktor kedua, kata Ujang, adalah harapan. Kandidat tersebut pindah partai karena melihat harapan bisa terpilih sebagai anggota DPR serta punya peran besar di partai. Kandidat itu membandingkan kondisi di partai saat ini yang mungkin kurang difungsikan dan dihargai lewat perannya. Ketika pindah, ia akan sekuat tenaga mendapatkan jabatan, dalam hal ini kursi legislatif. Faktor lain adalah soal pragmatisme. "Di mana ada peluang, di situ ada harapan, di situ ada kesempatan yang lebih baik, ya dia keluar dan berjuang di tempat barunya tersebut," kata Ujang.

Ujang menambahkan, permasalahan pragmatisme berkaitan dengan kondisi partai. Sikap partai yang menerima kutu loncat juga memicu kandidat rela pindah parpol dan berlabel 'kutu loncat'. "Jadi pragmatisme ada, lebih dominan ketika pindah-pindah partai tersebut dan ini fenomena umum yang terjadi di figur yang menjadi kutu loncat maupun di partai-partai politik dan penerimaan partai politik juga kan biasa-biasa saja, enggak ada yang nolak. Mereka terima-terima saja," tutur Ujang.

Ujang menegaskan, ada beberapa faktor partai akhirnya rela menerima kutu loncat. Penerimaan itu karena figur tersebut sudah memiliki modal, baik popularitas maupun finansial. Ujang menilai, fenomena kutu loncat bukan masalah jika ditilik dari sisi kenyataan politik. Hal ini tidak lepas dari kondisi politik Indonesia yang mengedepankan pragmatisme dan simbiosis mutualisme. Namun, jika melihat secara etika politik, hal tersebut tidak baik. "Secara etika politik enggak bagus, tapi di politik jarang menggunakan etika dan dilakukan ya perjuangan pragmatisme tadi itu," tutur Ujang.

Sikap permisif publik membuat para kutu loncat bisa tetap melenggang ke posisi strategis seperti anggota DPR. Hal ini semakin kuat karena rakyat memilih bukan berdasarkan visi, misi atau program, melainkan kedekatan personal. "Rakyat sebenarnya gak diuntungkan. Kerugiannya, ya karena mestinya para kutu loncat berjuang di partai dan konsisten untuk membangun aspirasi rakyat, tetapi dia pindah partai dan masyarakat perlu adaptasi kembali," kata dia.

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, kemunculan kutu loncat menandakan fungsi dan kaderisasi partai gagal. "Jadi partai politik yang kaderisasi enggak jalan,

tadi fungsi-fungsi partai enggak ada yang jalan, kelembagaan partai politik juga. Itu sebenarnya yang terjadi, sehingga ya siapapun bisa masuk partai manapun dengan suka-suka dengan kepentingan masing-masing, apalagi punya uang," kata Ujang.

Ujang menilai, masalah kutu loncat harus diselesaikan. Ia menilai fenomena ini bisa dihentikan jika DPR menggunakan wewenang mereka untuk mengubah aturan demi mencegah politik kutu loncat. Namun, hal itu sulit terjadi karena partailah yang mengisi kursi di DPR dan mereka tidak mau kehilangan benefit tersebut. (wid,rls,ist,mer/dya)

MEREKA YANG PINDAH PARTAI JELANG PEMILU 2024



HILLARY BRIGITTA LASUT
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi NasDem, Hillary Brigitta di pileg 2024 ini tercatat maju dari Partai Demokrat. Ia mengisi dapil Sulawesi Utara dengan nomor urut 1.



WIDYA PRATIWI MURAD ISMAIL
Istri dari Gubernur Maluku Murad Ismail, Widya Murad Ismail memutuskan pindah dari PDIP dan maju caleg di PAN. Ia tercatat di DCS berada di dapil Maluku dengan nomor urut 4.



ANANG HERMANSYAH
Anang kembali maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2024 dari PDIP. Artis tarik suara ini sebelumnya pernah menjadi anggota DPR Fraksi PAN pada periode 2014-2019.



DENNY CAGUR
Denny yang terkenal sebagai komedian pernah menjadi kader PAN. Kini, Denny berseragam merah PDI Perjuangan. Ia menjadi calon legislatif dari Dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.



CHOKY SITOHANG
Choky kembali mencoba peruntungannya menjadi anggota DPR RI. Pada 2019 lalu ia maju dari Partai Perindo. Kini Choky menjadi calon legislatif dari Partai NasDem. Ia bertarung di Dapil Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi.

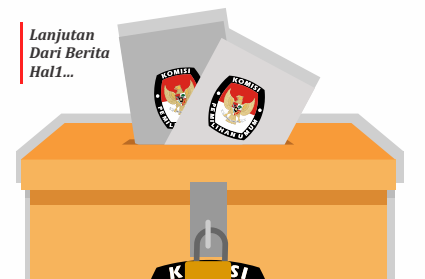


VENNA MELINDA
Perpindahan Venna Melinda ke Perindo merupakan yang ketiga kalinya selama ia berkariyer dalam dunia politik. Dia pertama kali terjun ke politik dengan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Ia pun masuk parlemen dua periode, yaitu 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, pada 2018 atau menjelang Pemilu 2019, Venna Melinda memutuskan hangkang dari Demokrat dan berlabuh di Partai Nasdem.



WANDA HAMIDAH
Dia pernah menjadi anggota DPRD DKI 2009-2014 dari Fraksi PAN. Namun, dipecat PAN karena mendukung Jokowi-JK pada Pemilu 2014, sementara PAN mengusung Prabowo-Hatta Radjasa. Pada Pemilu 2019, Wanda maju dari Partai Nasdem. Akan tetapi, ia gagal masuk ke Senayan. Jelang Pemilu 2024, Wanda kembali aktif di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Golkar.

Lanjutan Dari Berita Hal 1...





TEKA-TEKI PULANGNYA EKS PM THAILAND THAKSIN LANGSUNG MASUK PENJARA USAI 15 TAHUN ASINGKAN DIRI

Mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra, menyapa para pendukungnya di Bandara Don Mueang, Bangkok Selasa (22/8/2023) usai mengasingkan diri sekaligus menjadi buroan selama sekitar 15 tahun. (getty)

BANGKOK-Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang menjadi buroan, pada Selasa (22/8/2023) menginjakkan kaki di Thailand untuk pertama kalinya sejak 'menghilang' pada 2008. Ia kembali dari pengasingan dan langsung dibawa ke penjara. Hal ini hanya beberapa jam sebelum sekutunya mengikuti pemungutan suara parlemen dalam upaya membentuk pemerintahan.

Thaksin, miliarder dan pemimpin partai populis Partai Pheu Thai, melarikan diri ke luar negeri 15 tahun yang lalu sebelum ia dipenjara secara in-absentia karena penyalahgunaan kekuasaan. Ini dua tahun setelah militer menggulingkannya dalam sebuah kudeta, dengan tuduhan korupsi dan ketidaksetiaan kepada monarki yang berkuasa, yang dia bantah.

Pria berusia 74 tahun itu muncul sebentar bersama anggota keluarganya di terminal jet pribadi di Bandara Don Mueang Bangkok. Thaksin tersenyum dan melambai kepada ratusan pendukungnya, sebelum dia diantar dalam konvoi polisi ke Mahkamah Agung. Ia kemudian dibawa ke penjara, di mana, pengadilan mengatakan, akan menjalani hukuman delapan tahun.

Ketika ia keluar dari bandara dengan mengenakan jas hitam, dasi merah, dan pin kerah kuning berlambang kerajaan, Thaksin mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam salam tradisional "wai" di depan potret raja dan ratu.

Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, membenarkan bahwa Thaksin telah tiba dengan selamat dan memposting gambar Thaksin yang tersenyum bersama keluarganya, termasuk tujuh cucunya, di Facebook. "Ayah sudah kembali ke Thailand dan sudah memasuki proses hukum," kata Paetongtarn.

Kedatangan politisi paling terkenal di Thailand ini terjadi ketika majelis rendah dan Senat yang ditunjuk

militer mengadakan pertemuan menjelang pemungutan suara pada Selasa malam atas calon perdana menteri Srettha Thavisin. Ia seorang maestro real estat yang didorong ke dunia politik oleh Pheu Thai beberapa bulan yang lalu.

Pada postingan media sosial sebelumnya saat dia menaiki pesawatnya di Singapura, saudara perempuannya Yingluck mengatakan "hari yang ditunggu kakakku telah tiba".

"Selama 17 tahun terakhir, Anda merasa terisolasi, kesepian, bermasalah, dan merindukan rumah, tetapi Anda bertahan," kata Yingluck, yang juga tinggal di pengasingan, dalam postingan tersebut.

Srettha Thavisin Terpilih Jadi PM

Di sisi lain, Srettha Thavisin terpilih menjadi Perdana Menteri (PM) terbaru Thailand setelah mengamankan dukungan parlemen yang diperlukan. Terpilihnya Srettha ini mengakhiri kebuntuan politik selama tiga bulan terakhir setelah pemilu dimenangkan oleh Partai Move Forward yang kini dikucilkan dari koalisi pemerintahan.

Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (22/8/2023), Srettha berhasil mendapatkan dukungan lebih dari 375 anggota parlemen dan para senator yang diperlukan untuk bisa terpilih menjadi PM Thailand dalam voting gabungan yang digelar kembali untuk kesekian kalinya.

Dukungan penuh dari parlemen dan Senat Thailand diperlukan, menurut undang-undang Thailand, untuk menjadi seorang PM dan membentuk pemerintahan.

Pita Limjaroenrat yang memimpin Partai Move Forward yang memenangkan pemilu Thailand pada 14 Mei lalu, gagal mendapatkan cukup dukungan parlemen dan Senat untuk bisa menjadi PM Thailand dalam voting yang digelar bulan lalu.

Skandal kepemilikan saham di perusahaan media membuat Pita didiskualifikasi sebagai anggota parlemen dan tidak bisa lagi dicalonkan menjadi PM Thailand.

Partai Pheu Thai, yang menempati peringkat kedua dalam pemilu, lantas mengajukan Srettha sebagai calon PM ke parlemen. Sosok Srettha yang dikenal sebagai maestro real estate di Thailand ini, terjun ke dunia politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu digelar pada 14 Mei lalu.

Saat mengajukan Srettha sebagai calon PM, Pheu Thai yang sebelumnya mendukung dan tergabung koalisi Partai Move Forward yang akhirnya kolaps, memutuskan untuk mengeluarkan partai pemenang pemilu itu dari koalisi.

Kembalinya Thaksin ke Thailand terjadi bersamaan dengan upaya partainya, Pheu Thai, untuk membentuk pemerintahan baru - sebuah proses memakan waktu yang terus berlangsung selama tiga bulan terakhir.

Thailand awalnya diprediksi akan mengalami pembaruan lantaran partai muda Move Forward berhasil memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu bulan Mei. Namun, partai itu kemudian menjalin kemitraan dengan Pheu Thai.

Kini, Thailand justru kembali ke politik lama, yaitu koalisi yang terdiri dari hampir semua pihak termasuk dua partai yang dipimpin oleh mantan pembuat kudeta. Move Forward malah tidak dilibatkan dalam koalisi ini. Padahal, Pheu Thai sudah berikrar untuk tidak melakukan koalisi semacam itu.

Pheu Thai menegaskan kedua peristiwa ini tidak berkaitan satu sama lain, tapi hanya sedikit orang yang mempercayainya. Meski demikian, Srettha di platform media sosial X, sebelumnya Twitter mengucapkan selamat datang kepada mantan PM Thaksin. "Selamat kepada keluarga Shinawatra dan mantan PM Thaksin. Kembali ke tempat lahir bersama

keluarga, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar," tulisnya. (afp,reuters, ist/dya)

SOSOK PM BARU THAILAND SRETTHA THAVISIN

Kelahiran:
15 Februari 1962 (usia 61 tahun)

Partai:
Partai Pheu Thai

Pendidikan:
- Teknik Sipil dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok
- Magister Administrasi Bisnis dari Sasin.

Jejak Bisnis:
- Srettha memulai kariernya di industri real estate pada 1984 ketika ia bergabung dalam program Pengembangan properti Sansiri yang kini berhasil menjadi diadakan pemerintah Thailand.

- Pada 1990, Srettha bersama beberapa sepupunya mendirikan perusahaan yang kemudian menjadi pengembang properti Sansiri yang kini berhasil menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Thailand.

- Pada 2022, Sansiri yang terdaftar di Bangkok (SIRI.BK) masih mampu membukukan pendapatan sebesar 34,9 miliar baht dan laba bersih 4,2 miliar baht. Bila dirupiahkan, laba bersih perusahaan milik PM baru Thailand itu mencapai Rp 1,83 triliun (kurs Rp 437/Thailand bath).

- Di luar itu ia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi dan amal, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Alumni Universitas Chulalongkorn dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Rumah Sakit Bangkok

